



**LAPORAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN  
TAHUN 2017**

**Tim Reformasi Birokrasi  
Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan**

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa karena atas izinnya Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2017 telah selesai disusun.

Laporan ini disusun dengan tujuan memberikan gambaran pelaksanaan reformasi birokrasi dan sebagai akuntabilitas Tim Reformasi Birokrasi dalam menjalankan amanatnya mengemban reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Laporan ini sebagai bentuk komitmen seluruh komponen di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk mendukung dan berupaya keras dalam meningkatkan kualitas pelaksanaan reformasi birokrasi. Namun demikian, kami menyadari masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Ucapan terimakasih kami sampaikan kepada semua pihak yang telah memberikan kontribusi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi. Semoga Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun 2017 dapat menjadi bahan evaluasi dan *feed back* untuk peningkatan capaian reformasi birokrasi tahun selanjutnya.

Tim RB Kemenko PMK

## DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
<b>BAB I PENDAHULUAN</b> .....	1
1.1. Latar Belakang .....	1
1.2. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi .....	3
1.3. Tujuan Reformasi Birokrasi .....	6
1.4. Sasaran .....	6
1.5. Dasar Hukum .....	7
<b>BAB II PELAKSNAAN KEGIATAN</b> .....	9
2.1. Capaian Reformasi Birokrasi .....	9
2.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut.....	31
<b>BAB III PENILAIAN REFORMASI BOROKRASI</b> .....	33
3.1. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi .....	39
3.2. Penyesuaian Tunjangan Kinerja .....	39
<b>BAB IV PENUTUP</b> .....	40

# BAB I PENDAHULUAN

## 1.1. Latar Belakang

Kebijakan pembangunan reformasi birokrasi dilaksanakan dalam rangka meningkatkan tata kelola pemerintahan yang lebih baik dan merupakan bagian terpenting dalam meningkatkan pelaksanaan pembangunan nasional. Kebijakan reformasi birokrasi pada akhirnya diharapkan dapat mencapai peningkatan kualitas pelayanan publik yang lebih baik, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas kinerja birokrasi, dan peningkatan profesionalisme sumber daya aparatur pemerintah, serta penyelenggaraan pemerintahan yang bersih dan bebas KKN.

Reformasi adalah pengubahan, perombakan, penataan, perbaikan atau penyempurnaan. Birokrasi adalah aparatur, lembaga/instansi, organisasi pemerintah, pegawai pemerintah, sistem kerja, dan perangkat kerja. Layanan kepada masyarakat harus berkualitas, bebas KKN, efektif dan efisien, empati, terjangkau, akuntabel, adil dan tidak diskriminatif. Reformasi Birokrasi merupakan upaya sistematis, terpadu dan komprehensif untuk mewujudkan pemerintahan yang baik (*good governance*) yang meliputi aspek kelembagaan, sumber daya manusia aparatur, ketatalaksanaan, akuntabilitas, pengawasan, dan pelayanan publik. Reformasi Birokrasi dihadapkan pada upaya mengatasi inefisiensi, inefektivitas, tidak profesional, tidak netral, tidak disiplin, tidak patuh pada aturan, rekrutmen PNS tidak transparan, belum ada perubahan *mindset*, KKN yang marak di berbagai jenjang pekerjaan, abdi masyarakat belum terbangun, pemerintahan belum akuntabel, transparan, partisipatif, dan kredibel, pelayanan publik belum berkualitas dan pelayanan public prima belum terbangun secara luas.

Dalam *grand design* reformasi birokrasi yang ditetapkan dalam Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 menargetkan bahwa Indonesia memiliki pemerintahan yang berkelas dunia. Sejalan dengan hal tersebut, pelaksanaan reformasi birokrasi merupakan salah satu bidang utama dalam pembangunan nasional. Bahkan sejak RPJM 2004-2009 dan 2010-2014, pelaksanaan reformasi birokrasi menjadi prioritas nasional. Oleh karena itu, keberlanjutan pelaksanaan reformasi birokrasi memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik. Hasil-hasil yang telah diperoleh dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada periode 2010 – 2014 menjadi dasar bagi pelaksanaan reformasi birokrasi pada tahapan selanjutnya (2015 – 2019). Dengan kata lain, pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 merupakan

penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi tahapan sebelumnya serta pembaharuan dalam menghadapi permasalahan baru di masa mendatang.

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sudah dilaksanakan selama lebih dari 7 (tujuh) tahun, diawali Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat pada tahun 2010. Pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada hari tanggal 15 Desember 2010, dengan telah disahkannya Perpres Nomor 71 Tahun 2010, tentang Tunjangan Kinerja Pegawai Di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, yang kemudian pada tahun 2015 Perpres tersebut diperbaharui melalui Perpres 109 Tahun 2015 Tanggal 9 Oktober 2015 Tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Perubahan nomenklatur Kementerian Koordinator yang dahulu bernama Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat menjadi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan terjadi pada Kabinet Kerja pemerintahan Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Jusuf Kalla. Sejalan dengan itu, dilakukan penyusunan struktur baru Kementerian Koordinator Kemenko PMK yang kemudian telah disahkan melalui Peraturan Menteri Koordinator Bidang PMK Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Didalam proses penyusunan struktur Kemenko PMK dan proses pembentukan jabatan baru, menurut Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Pasal 46 tertulis bahwa "Pada saat Peraturan Presiden ini mulai berlaku, seluruh jabatan yang ada beserta pejabat yang memangku jabatan di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat, tetap melaksanakan tugas dan fungsinya sampai dengan dibentuknya jabatan baru dan diangkat pejabat baru berdasarkan Peraturan Presiden ini." Pelantikan pejabat baru di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan baru dilaksanakan pada bulan September 2015.

Berdasarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, maka

tugas Kemenko PMK adalah membantu Presiden menyelenggarakan koordinasi, sinkronisasi dan pengendalian urusan Kementerian dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang pembangunan manusia dan kebudayaan. Didalam Renstra Kemenko PMK Tahun 2015 - 2019 disebutkan bahwa tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) telah menjadi isu sentral dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Kualitas tata kelola pemerintahan adalah prasyarat tercapainya sasaran pembangunan nasional, baik jangka pendek, menengah, maupun jangka panjang. Tingginya integritas aparatur Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dalam melaksanakan tugas dan fungsi bertanggungjawab dalam menjalankan tugas dan fungsi dengan baik dalam rangka mewujudkan *good governance*. Namun pada kenyataannya Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan juga dihadapkan pada beberapa permasalahan yang dapat mempengaruhi pencapaian sasaran yang harus dibenahi dalam kerangka reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Sejalan dengan hal tersebut, koordinasi percepatan reformasi dan birokrasi perlu dilaksanakan agar pelaksanaan tugas dan fungsi Kemenko PMK sejalan dengan tujuan pencapaian pembangunan nasional yang dirumuskan melalui sasaran reformasi birokrasi sebagai berikut:

1. Birokrasi yang akuntabel
2. Birokrasi yang efektif dan efisien
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan yang berkualitas
4. Birokrasi yang bersih, tertib dan melayani

## **1.2. Arah Kebijakan Reformasi Birokrasi**

Pelaksanaan reformasi birokrasi 2015 – 2019 didasarkan pada beberapa arah kebijakan pemerintah, sebagai berikut:

### **1. Nawacita**

Dalam dokumen NAWACITA, yang mencakup 9 (sembilan) janji yang ingin diwujudkan Pemerintah Joko Widodo dan Jusuf Kalla, yaitu:

- Menghadirkan kembali negara untuk melindungi segenap bangsa dan memberikan rasa aman kepada seluruh warga negara.
- Membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

- Membangun Indonesia dari pinggiran dengan memperkuat daerahdaerah dan desa dalam kerangka negara kesatuan.
- Memperkuat kehadiran negara dalam melakukan reformasi sistem dan penegakan hukum yang bebas korupsi, bermartabat, dan terpercaya.
- Meningkatkan kualitas hidup manusia Indonesia.
- Meningkatkan produktivitas rakyat dan daya saing di pasar internasional sehingga bangsa Indonesia bisa maju dan bangkit bersama bangsa-bangsa Asia lainnya.
- Mewujudkan kemandirian ekonomi dengan menggerakkan sektorsektor strategis ekonomi domestik.
- Melakukan revolusi karakter bangsa.
- Memperteguh kebhinekaan dan memperkuat restorasi sosial Indonesia.

Secara eksplisit arahan terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi tertulis dalam NAWACITA nomor 2 yaitu membuat Pemerintah selalu hadir dengan membangun tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, demokratis, dan terpercaya.

Visi Misi Presiden secara spesifik memberikan perhatian khusus terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, yaitu dengan menekankan pada lima (5) prioritas utama dalam reformasi birokrasi dan pelayanan publik, yaitu :

- Penetapan payung hukum yang lebih kuat dan berkesinambungan bagi agenda reformasi birokrasi
- Restrukturisasi kelembagaan yang cenderung gemuk
- Menjalankan secara konsisten UU Aparatur Sipil Negara
- Berkomitmen memberantas korupsi di kalangan aparatur sipil negara
- Melakukan aksi-aksi bagi perbaikan kualitas pelayanan publik

## 2. Agenda Pembangunan Nasional

Dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, Buku I, dijabarkan lima agenda pembangunan nasional sebagai berikut:

- Melanjutkan konsolidasi demokrasi untuk memulihkan kepercayaan publik
- Meningkatkan peranan dan keterwakilan perempuan dalam politik dan pembangunan
- Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan



- Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas Reformasi Birokrasi Nasional (RBN)
- Meningkatkan partisipasi publik dalam proses pengambilan kebijakan public

Dari lima agenda pembangunan nasional tersebut, dua di antaranya secara spesifik terkait dengan tata kelola pemerintahan yang bersih dan efektif, yaitu agenda nomor 3 dan 4 adalah:

- Membangun transparansi dan akuntabilitas kinerja pemerintahan,
- Menyempurnakan dan meningkatkan kualitas reformasi birokrasi nasional.

### 3. Isu Strategis-Agenda Prioritas 2015-2019

Beberapa isu strategis lintas pembina sektor aparatur negara, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, yang dijadikan arah kebijakan pelaksanaan reformasi birokrasi antara lain adalah sebagai berikut:

- Lemahnya penegakan hukum
- Rendahnya komitmen pencegahan dan pemberantasan korupsi
- APIP masih lemah
- Kualitas akuntabilitas kinerja instansi pemerintah masih rendah
- Pengadaan barang dan jasa masih belum dapat diselenggarakan secara efisien
- Organisasi gemuk, *fragmented* dan tumpang tindih fungsi
- Penerapan e-government belum merata
- Integritas PNS yang masih rendah
- Kualitas pelayanan publik masih rendah

### 4. Pengarusutamaan 2015-2019

Pengarusutamaan 2015-2019 Kebijakan pengarusutamaan, sebagaimana dimuat dalam Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015 – 2019, merupakan landasan operasional bagi seluruh pelaksanaan pembangunan, yang diarahkan untuk dapat tercermin dalam output pada kebijakan pembangunan Pengarusutamaan diarahkan untuk memperkuat kapasitas birokrasi dan mendorong partisipasi masyarakat sipil, melalui:

- Peningkatan keterbukaan informasi dan komunikasi publik;
- Peningkatan partisipasi masyarakat dalam perumusan kebijakan;



- Perluasan agenda Reformasi Birokrasi;
- Peningkatan kualitas pelayanan publik.

### **1.3. Tujuan Reformasi Birokrasi**

Secara umum tujuan reformasi birokrasi adalah menciptakan pemerintah yang professional dengan berkarakteristik, berintegritas, berkinerja tinggi, bebas dan bersih KKN, mampu melayani publik, sejahtera, berdeikasi, dan memegang teguh nilai-nilai dasar dan kode etik Aparatur Negara.

Untuk mempercepat pencapaian tujuan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan maka kegiatan percepatan koordinasi reformasi birokrasi perlu dilaksanakan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui keberhasilan dan kekurangan dari pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

### **1.4. Sasaran Reformasi Birokrasi**

Sesuai Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang RPJMN 2015-2019 sasaran reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, yaitu:


1. Birokrasi yang bersih dan akuntabel. Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:
  - Penerapan sistem nilai dan integritas birokrasi yang efektif.
  - Penerapan pengawasan yang independen, profesional, dan sinergis.
  - Peningkatan kualitas pelaksanaan dan integrasi antara sistem akuntabilitas keuangan dan kinerja.
  - Peningkatan fairness, transparansi, dan profesionalisme dalam pengadaan barang dan jasa.
2. Birokrasi yang efektif dan efisien Arah kebijakan dari sasaran ini meliputi:
  - Penguatan agenda Reformasi Birokrasi Nasional dan peningkatan kualitas implementasinya.
  - Penataan kelembagaan instansi pemerintah yang tepat ukuran, tepat fungsi, dan sinergis.
  - Penataan bisnis proses yang sederhana, transparan, partisipatif, dan berbasis e-government.
  - Penerapan manajemen ASN yang transparan, kompetitif, dan berbasis merit untuk mewujudkan ASN yang profesional dan bermartabat.

- Penerapan sistem manajemen kinerja nasional yang efektif.
  - Peningkatan kualitas kebijakan publik.
  - Pengembangan kepemimpinan untuk perubahan dalam birokrasi untuk mewujudkan kepemimpinan yang visioner, berkomitmen tinggi, dan transformatif.
  - Peningkatan efisiensi (belanja aparatur) penyelenggaraan birokrasi.
  - Penerapan manajemen kearsipan yang handal, komprehensif, dan terpadu.
3. Birokrasi yang memiliki pelayanan publik berkualitas, meliputi:
- Penguatan kelembagaan dan manajemen pelayanan
  - Penguatan kapasitas pengelolaan kinerja pelayanan publik.

### **1.5. Dasar Hukum**

Dasar hukum pelaksanaan reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan adalah:

- a. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- c. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- d. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
- e. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
- f. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);

- 
- g. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494 );
  - h. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 - 2025;
  - i. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara;
  - j. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2015 tentang Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - k. Peraturan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan;
  - l. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 11 Tahun 2015 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2015-2019.

## **BAB II PELAKSANAAN KEGIATAN**

### **2.1. Capaian Reformasi Birokrasi Kemenko PMK**

Dalam rangka mempercepat tercapainya tatakelola pemerintahan yang baik dan meningkatnya birokrasi pemerintahan yang professional dan berintegritas tinggi, maka reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2017 berfokus pada delapan (8) area perubahan dan memiliki sembilan (9) program kerja reformasi birokrasi.

Untuk mempercepat pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dan telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pada tahun 2017, pelaksanaan Reformasi Birokrasi melanjutkan kegiatan berdasarkan rekomendasi/masukan pada evaluasi dan verifikasi lapangan pelaksanaan reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan oleh Tim Evaluator Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Beberapa rekomendasi Kementerian PANRB yang menjadi acuan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan untuk penyempurnaan pelaksanaan kegiatan reformasi birokrasi adalah sebagai berikut:

- a. Menetapkan ukuran dan target yang relevan, spesifik, dan terukur untuk setiap area perubahan yang akan dicapai;
- b. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala atas ukuran dan target masing- masing area perubahan, yang bertujuan untuk melihat sejauh mana perkembangan pembangunan reformasi birokrasi di setiap area perubahan;

- c. Menginternalisasikan secara terus menerus budaya integritas dalam pelaksanaan tugas dan fungsi agar benar-benar menjadi budaya yang melekat dalam setiap individu pegawai;
- d. Menyusun dan menyempurnakan peta bisnis proses yang sesuai dengan kinerja utama Kemenko PMK dan secara berkala melakukan reviu atas SOP yang telah ditetapkan;
- e. Menyusun dan melakukan evaluasi atas kebijakan informasi terbuka di Kemenko PMK sebagai upaya melakukan transparansi dalam manajemen kinerja;
- f. Menyempurnakan ukuran kinerja setiap pegawai agar lebih menggambarkan hasil kerja yang spesifik dan unik;
- g. Melakukan monitoring, evaluasi, dan pengukuran secara berkala terhadap pegawai yang telah menetapkan target individu dan mengaitkannya dengan kebutuhan pengembangan kompetensi serta remunerasi yang diterima;
- h. Memperkuat penerapan sistem integritas, antara lain dengan melakukan evaluasi atas efektivitas penerapan kebijakan gratifikasi, WBS, penanganan pengaduan masyarakat, serta benturan kepentingan serta menetapkan langkah-langkah perbaikan sesuai hasil evaluasi tersebut;
- i. Mendorong penerapan zona integritas di lingkungan Kemenko PMK yang melakukan pelayanan langsung kepada masyarakat;
- j. Menyusun suatu pedoman penerapan sistem akuntabilitas kinerja internal untuk mendorong penguatan akuntabilitas serta meningkatkan efektivitas penggunaan anggaran negara;
- k. Reviu atas SOP pelayanan dalam rangka mendorong inovasi pada setiap unit kerja yang memberikan pelayanan publik dengan lebih memperhatikan kualitas layanan serta mekanisme pengendalian internal atas pelaksanaan layanan tersebut.

Adapun capaian reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2017 antara lain sebagai berikut:

**a. Program Manajemen Perubahan**

Salah satu area penting dalam reformasi birokrasi adalah perubahan *mindset* (pola pikir) dan *culture set* (budaya kerja). Perubahan pola pikir dan budaya kerja birokrasi ditujukan untuk mewujudkan peningkatan integritas dan kinerja birokrasi yang tinggi. Manajemen perubahan dalam

proses reformasi birokrasi di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Pelaksanaan Manajemen Perubahan yang diatur dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 10 Tahun 2011 serta Peraturan Menteri PANRB Nomor 027 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan Di Instansi Pemerintah.

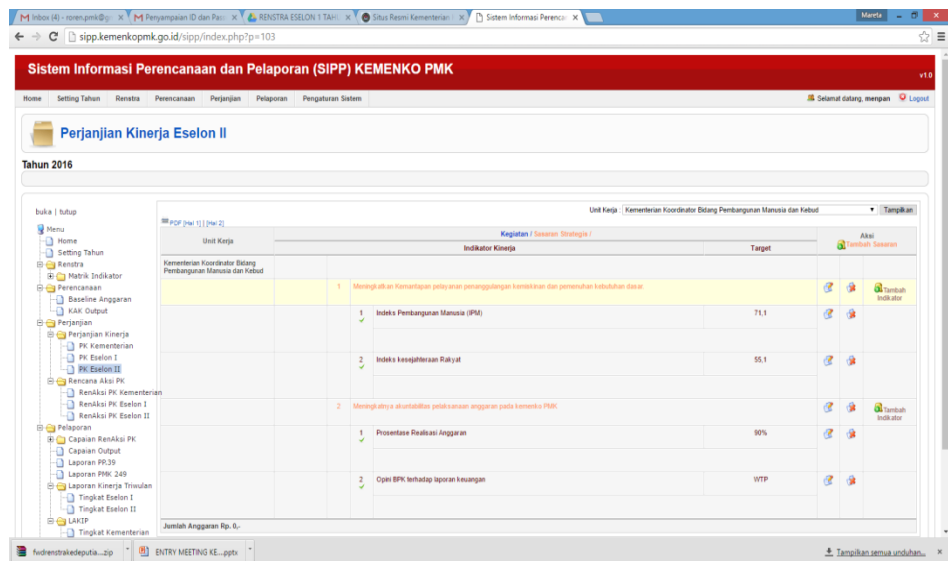
Pada tahun 2017, capaian reformasi birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Program Manajemen Perubahan adalah:

1. Telah dibentuk Tim Reformasi Birokrasi sesuai kebutuhan organisasi melalui Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 17 Tahun 2016 dan telah diperbaharui dengan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tim Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.
2. Penyempurnaan/Reviu Roadmap Reformasi Birokrasi Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan 2015-2019.
3. Sosialisasi Roadmap Reformasi Birokrasi Kemenko PMK.
4. Pelaksanaan rapat pimpinan Eselon I dan II.
5. Penerapan Sistem Informasi Perencanaan dan pelaporan (SIPP).



Gambar Kegiatan Rapim Eselon I dan II





Gambar Cuplikan layar Perjanjian Kinerja pada SIPP



Gambar Kegiatan Reviu Road Map dan Evaluasi RB Kemenko PMK

## b. Program Penataan dan Penguatan Organisasi

Program ini bertujuan untuk membangun organisasi yang tepat fungsi dan tepat ukuran (right sizing) dan menghindari tumpang tindih di Kemenko PMK. Program ini dilaksanakan dengan melakukan reviu kembali atas struktur organisasi dan tata kerja berdasarkan Rencana Strategis Kemenko



PMK periode 2015-2019 (*structure follow function*) dan penguatan unit-unit kerja yang menangani organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat khususnya dalam penyediaan sarana dan prasana, kompetensi dan kuantitas pegawai serta penetapan dan penerapan dasar hukum dan standar pelayanan.

Sasaran program penataan dan penguatan organisasi yang akan dicapai adalah:

- Tersedianya peta tugas dan fungsi unit kerja di instansi yang tepat fungsi dan tepat ukuran yang dituangkan di dalam dokumen struktur organisasi dan tata kerja instansi.
- Tersedianya rencana penguatan (dokumen organisasi dan tata kerja, uraian tugas dan fungsi) unit organisasi yang secara fungsional melaksanakan fungsi organisasi, tata laksana, pelayanan publik, kepegawaian dan diklat.

Adapun capaian program penataan dan penguatan organisasi antara lain:

1. Telah dilakukan *Review* terhadap Struktur Organisasi dan Tata Kerja Kemenko PMK.
2. Telah dilakukan kegiatan persiapan evaluasi organisasi bersama Kementerian PANRB. Hasil kesepakatan dalam rapat adalah:
  - Evaluasi organisasi dilakukan agar tersedia rekomendasi untuk penataan organisasi.
  - Penataan organisasi bukan menjadi satu-satunya solusi untuk evaluasi organisasi. Faktor lain seperti SDM menjadi pertimbangan dalam penataan organisasi.
  - Evaluasi organisasi dapat dilakukan melalui perubahan Peraturan Presiden atau tanpa perubahan Peraturan Presiden.
  - Akan membuat naskah akademis, dengan mengacu pada hasil kajian yang sudah ada.
  - Pembahasan Evaluasi Organisasi dengan Kementerian PANRB dilakukan setelah usulan disampaikan kepada Kementerian PANRB.



Gambar Kegiatan Persiapan Evaluasi Organisasi Kemenko PMK

### c. Program PenataanTata Laksana

Program kerja ini bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas bisnis proses dan mekanisme kerja/prosedur dalam sistem manajemen organisasi.

Sasaran program penataan tata laksana yang akan dicapai adalah:

- Membangun proses penyelenggaraan pemerintahan di Kemenko PMK secara transparan, akuntabel, dan memiliki *Standard Operating Procedure* (SOP);
- Menerapkan manajemen kearsipan yang handal.






Adapun capaian program penataan tata laksana antara lain: SOP telah disusun, Uraian jabatan telah disusun, *Roadmap* dan hasil asesment penerapan E-Gov di Kemenko PMK (*grand design*), SIPP, *Dashboard*, *Website Kemenko PMK*, Adapun kegiatan yang telah dilakukan dalam rangka penyusunan SOP adalah sebagai berikut:

1. Tersedia Peta Proses Bisnis;
2. Penyusunan sebagian besar SOP;
3. Penerapan *Roadmap* dan hasil *assesment* penerapan e-Gov di Kemenko PMK (*grand design*);
4. Tersedia *Dashboard* kinerja Eselon II Kemenko PMK;

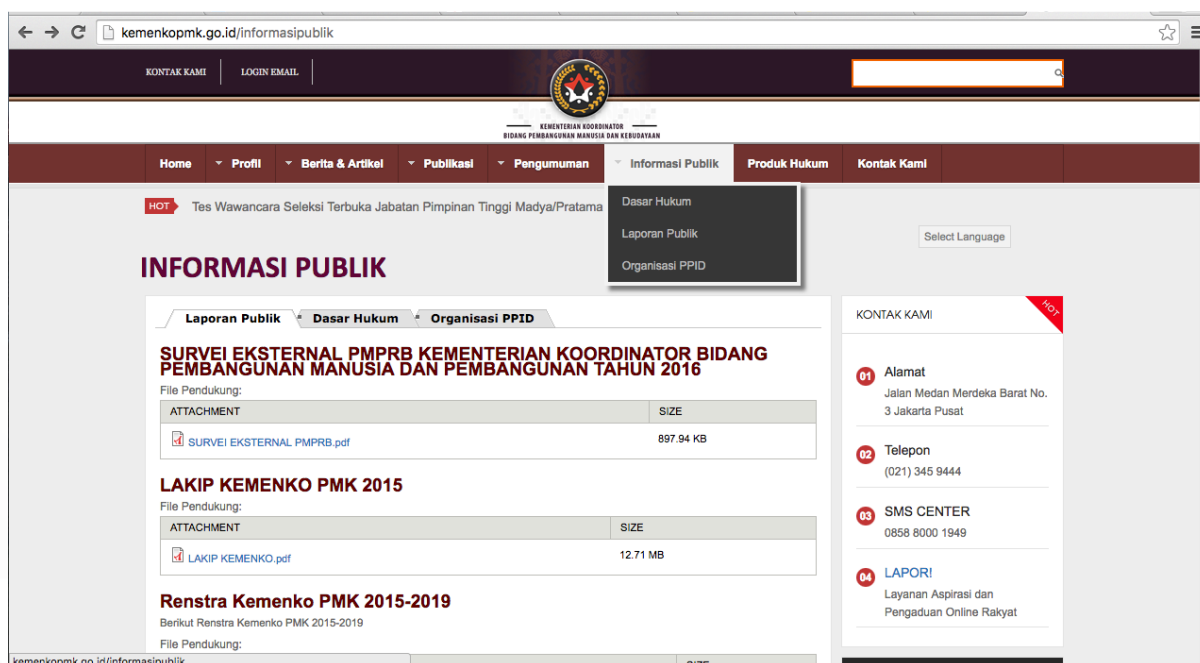
- Penyusunan *Draft* Kepmenko PMK tentang PPID (sudah berjalan, tapi revisi dasar hukum masih proses penetapan. Kepmenko Kesra Nomor 17 Tahun 2011 tentang Organisasi PPID dan Permenko Kesra Nomor 04 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Informasi sudah ada).

**SISTEM Monitoring Kegiatan**  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

**RANGKUMAN CAPAIAN**

NO.	NAMA	PHOTO	KATALOG DATA	KATALOG KEBUJUKAN	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN	LAPORAN KEJABARAN	RENCANA KERJA BELAJAR	LAPORAN KERJA BELAJAR	BUKU HARIAN
1	<b>Herbin Manihuruk</b> Asisten Deputi Pengurangan Resiko Bencana		31 2016-08-15	1 2016-04-08	2/5 2016-05-05	4/4 2016-05-05	24 2016-06-03	17 2016-06-01	124 2016-06-03
2	<b>Djoko Joewono</b> Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana		23 2016-06-29	1 2016-03-22	1/3 2016-05-05	3/3 2016-05-10	15 2016-05-10	12 2016-05-10	102 2016-06-03
3	<b>Detty Rosita</b> Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana		21 2016-06-14	1 2016-06-20	2/3 2016-05-05	3/3 2016-05-05	4 2016-03-22	3 2016-04-20	114 2016-06-29
4	<b>Ponco Respati Nugroho</b> Asisten Deputi Konflik Sosial		20 2016-03-30	0 0000-00-00	1/2 2016-04-26	2/2 2016-04-27	26 2016-06-24	20 2016-06-24	114 2016-06-28
5	<b>G. Fajar Suryono</b> Asisten Deputi Kompensasi Sosial		84 2016-06-02	11 2016-04-05	5/7 2016-04-15	0/0 0000-00-00	21 2016-05-04	14 2016-04-11	160 2016-06-02

Gambar Screenshot Log Book



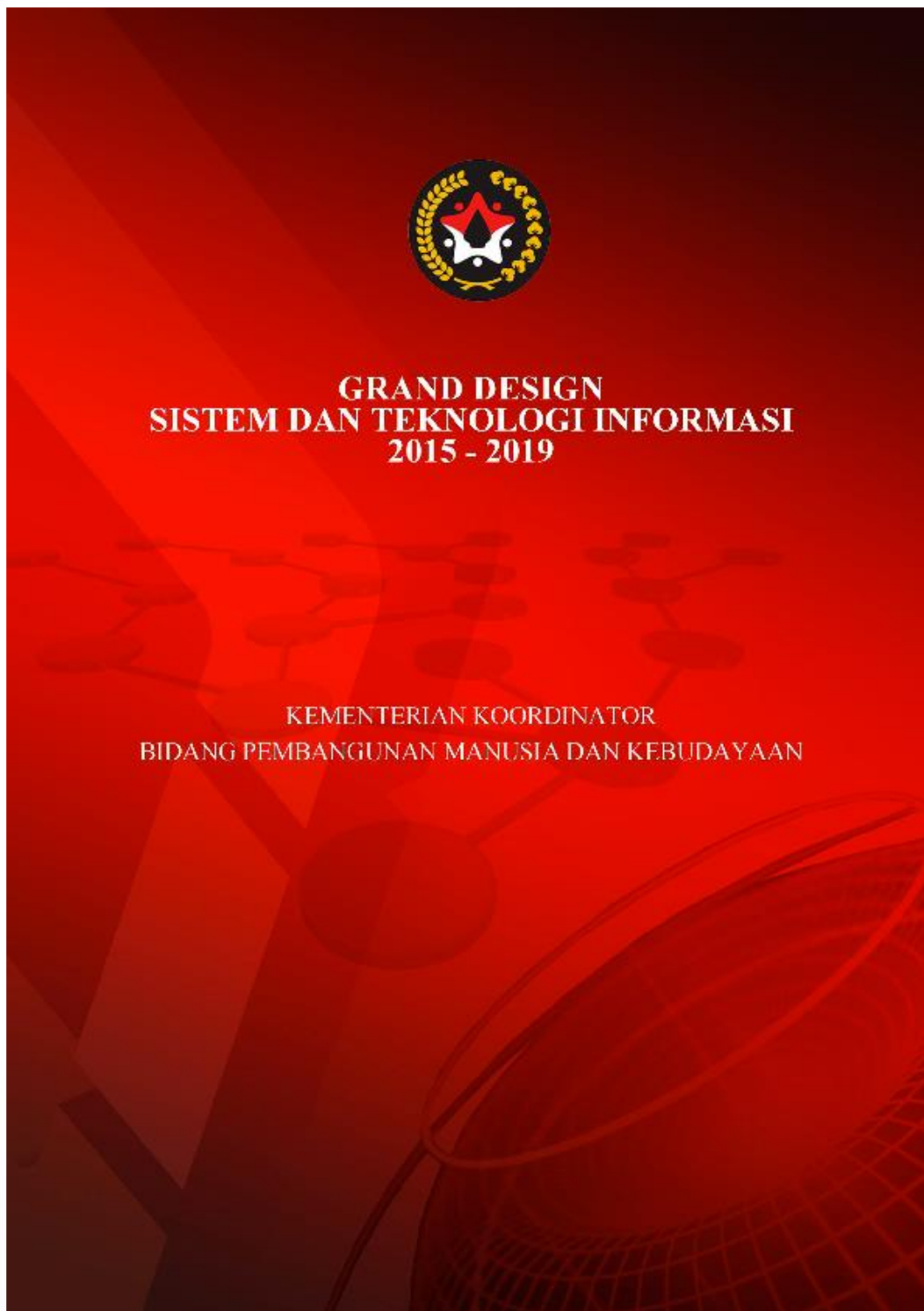
The screenshot shows the website interface for 'KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN'. The main content area is titled 'INFORMASI PUBLIK' and features a dropdown menu with options: 'Laporan Publik', 'Dasar Hukum', and 'Organisasi PPID'. The 'Laporan Publik' section is active, displaying a list of documents for download:

- SURVEI EKSTERNAL PMPRB KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016**  
File Pendukung:  
ATTACHMENT | SIZE  
SURVEI EKSTERNAL PMPRB.pdf | 897.94 KB
- LAKIP KEMENKO PMK 2015**  
File Pendukung:  
ATTACHMENT | SIZE  
LAKIP KEMENKO.pdf | 12.71 MB
- Renstra Kemenko PMK 2015-2019**  
Berikut Renstra Kemenko PMK 2015-2019  
File Pendukung:  
ATTACHMENT | SIZE

On the right side, there is a 'KONTAK KAMI' section with contact information:

- 01 Alamat: Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
- 02 Telepon: (021) 345 9444
- 03 SMS CENTER: 0858 8000 1949
- 04 LAPOR! Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

Gambar Screenshot Informasi Publik di Web



**Gambar Tampilan Depan Grand Design STI Kemenko PMK**

#### d. Program Penataan Sistem Manajemen SDM

Program ini bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur Kemenko PMK yang didukung oleh sistem rekrutmen dan promosi aparatur berbasis kompetensi, transparan, serta kesejahteraan yang sepadan. Pelaksanaan program ini dilakukan dengan penyempurnaan siklus SDM mulai dari perencanaan, rekrutmen, penempatan, pengembangan dan penghargaan terhadap kinerja pegawai sesuai dengan kompetensi

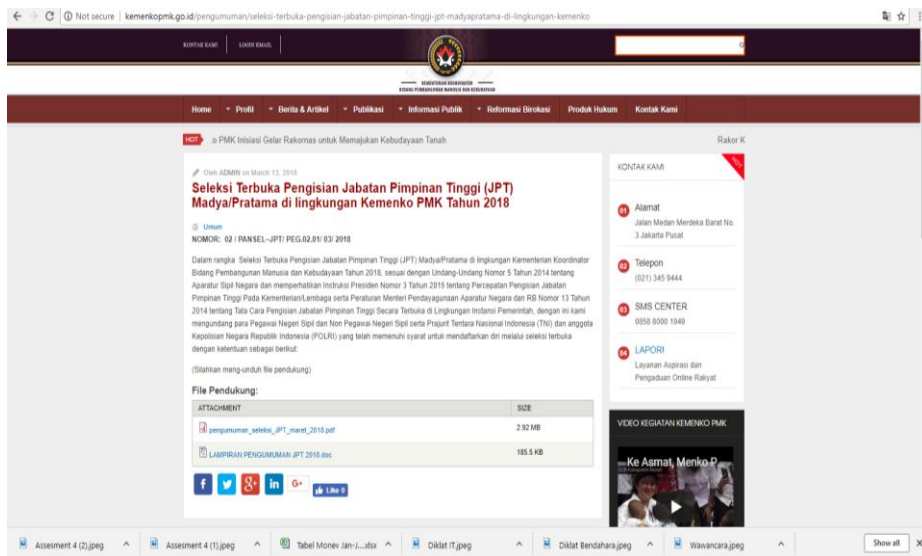
Sasaran program penataan system manajemen SDM yang akan dicapai adalah:

- Tersedianya dan diterapkannya sistem rekrutmen pegawai berbasis kompetensi yang transparan dan akuntabel.
- Tersedianya dokumen uraian jabatan untuk seluruh jabatan struktural dan non struktural yang ada dalam struktur organisasi.
- Tersedianya *Job Grading* yang sudah divalidasi oleh Kementerian PAN dan RB dan BKN untuk semua jabatan.
- Tersedianya dokumen standar kompetensi jabatan.
- Tersedianya peta profil kompetensi individu.
- Tersedianya sistem penilaian kinerja individu.
- Tersedianya database pegawai yang akurat.

Adapun capaian program penataan system manajemen SDM antara lain:

1. Melakukan pendidikan dan pelatihan pegawai;
2. Promosi jabatan secara terbuka sudah dilakukan;
3. Penyiapan jabatan fungsional tertentu sedang berjalan;
4. Pengembangan SKP elektronik;
5. Evaluasi level eselon II sudah dilakukan melalui penilaian laporan tahunan;
6. Sistem penerimaan CPNS telah menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)*;
7. Sistem absensi *online* dengan *finger print*;
8. Penghargaan Pengelolaan SDM terbaik untuk kategori Kementerian Kecil.





**Gambar Pengumuman Pembukaan Seleksi Terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama 2018.**



**Gambar Seskemenko PMK Sedang Memberikan Arahana pada Pelaksanaan Assesment Test 2018**



**Gambar Pelaksanaan Tahapan Penulisan Makalah pada Seleksi JPT Madya/Pratama 2018**

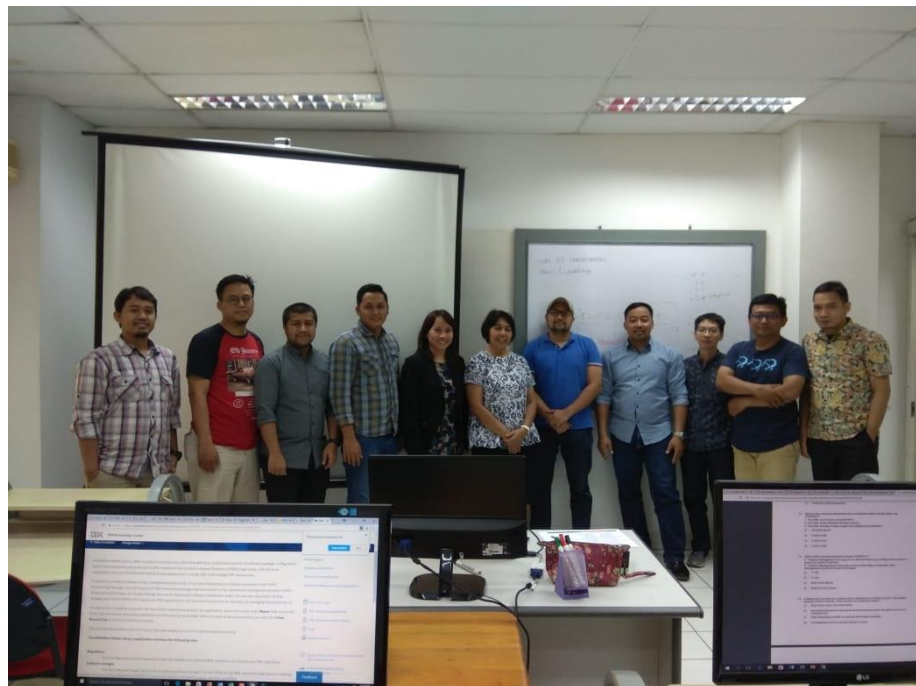


**Gambar Seskemenko PMK selaku Ketua Tim Panitia Seleksi JPT Madya/Pratama Bersama Anggotanya Sedang Melaksanakan Wawancara**





**Gambar Pelaksanaan Dilkat Bendahara tgl. 9-11 April 2018**



**Gambar Pelaksanaan Dilkat IT tanggal 30 Juli s/d 1 Agustus 2018**



**Gambar Penghargaan dari Kepala Badan Kepegawaian Negara karena dalam penerimaan CPNS Kemenko telah menggunakan Sistem penerimaan CPNS dengan menggunakan sistem *Computer Assisted Test (CAT)***

kemerkopmk.go.id/pengumuman/pengumuman-peserta-ujian-yang-lulus-dalam-seleksi-penerimaan-calon-pegawai-negeri-sipil

an Dian NeoBux: The Innova... Sygic GPS Navigatio... DESAINGRATIS.COM HP 430 Notebook P... Live Firstmedia»First... SUBHANALLAH... Mp3 Do

KEMENTERIAN KEBUDAYAAN DAN KEBUDAYAAN  
BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN KEBUDAYAAN

Home Profil Berita dan Artikel Publikasi & Galeri Pengumuman Informasi Publik Produk Hukum Kontak Kami

**HOT** Foto Bersama Rakor Pem RI – UN WFP

Oleh ADMIN on December 08, 2014

**PENGUMUMAN PESERTA UJIAN YANG LULUS DALAM SELEKSI PENERIMAAN CALON PEGAWAI NEGERI SIPIL (CPNS) KEMENKO PMK 2014**

Umum

Berdasarkan Surat Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor: B/5289/M.PAN-RB/12/2014 tanggal 5 Desember 2014 perihal Penyampaian Hasil Integrasi Nilai TKD dan TKB Seleksi CPNS Tahun 2014, dengan ini diumumkan Nama-Nama Peserta Ujian Yang Lulus Dalam Seleksi Penerimaan Calon Pegawai Negeri Sipil Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Tahun Anggaran 2014 (terlampir). Selanjutnya kepada nama-nama sebagaimana tersebut dalam lampiran ini agar melapor dan tidak mewakilkan dengan membawa asli Kartu Tanda Peserta Ujian pada:

Hari : Senin  
Tanggal : 15 Desember 2014  
Pukul : 09.00 WIB  
Tempat : Ruang Rapat Lantai 2 Office Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Jl. Medan Merdeka Barat Nomor 3 Jakarta Pusat

guna mendapatkan pengarahan serta membawa kelengkapan persyaratan administrasi untuk pengangkatan Calon Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

[download pdf](#)

**File Pendukung:**

ATTACHMENT	SIZE
HASIL SELEKSI CPNS KEMENKO PMK 2014.pdf	5.81 MB

Bagi yang mencari informasi pada kurun sebelum juni 2014 silakan mengunjungi  
**WEBSITE LAMA**  
dan dapat menggunakan fasilitas *search*  
[2010.menkokesra.go.id](http://2010.menkokesra.go.id)

**HOT** KONTAK KAMI

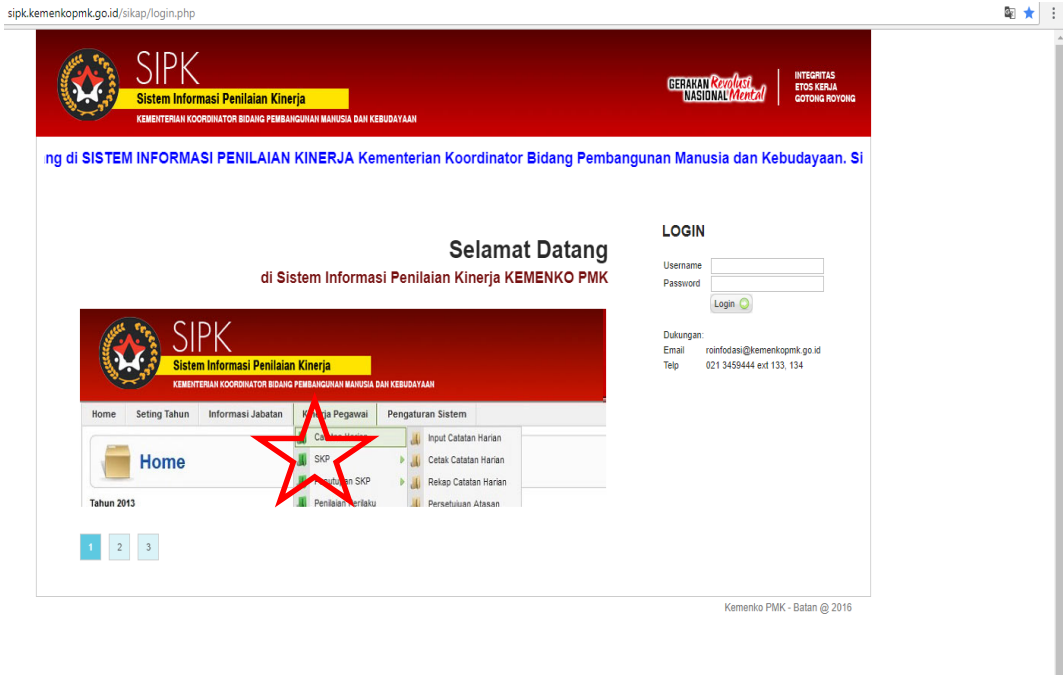
01 **Alamat**  
Jalan Medan Merdeka Barat  
No. 3 Jakarta Pusat

02 **Telepon**  
(021) 345 9444

03 **SMS CENTER**  
0858 8000 1949

04 **LAPOR!**  
Layanan Aspirasi dan

**Gambar Screenshoot Pengumuman Seleksi Penerimaan CPNS**



**Gambar Screenshoot SKP Secara Elektronik**

**e. Program Penataan Peraturan Perundang-undangan**

Program penataan peraturan perundang-undangan bertujuan untuk mencapai peraturan / regulasi yang harmonis dan sinkron sehingga pelaksanaannya dapat efektif dan efisien.

Program ini dilaksanakan melalui penataan peraturan perundang undangan dan melakukan pengembangan dan pendampingan hukum.

Keberhasilan dari program/kegiatan Penataan Peraturan Perundang-undangan ini akan diukur berdasarkan indikator tersedianya / tersusunnya pemetaan berbagai peraturan perundang-undangan.

Adapun capaian program penataan peraturan perundang-undangan, antara lain:

- Digitalisasi produk peraturan perundang-undangan;
- Sosialisasi peraturan perundang-undangan;
- Identifikasi dan analisis terhadap seluruh peraturan perundang-undangan bidang PMK yang tidak harmonis dan sinkron dengan peraturan perundang-undangan lainnya.

#### f. Program Penguatan Pengawasan

Program ini bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN dengan tercapainya tujuan organisasi secara efisien dan efektif serta taat pada peraturan serta pengelolaan keuangan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan yang andal dan terpercaya.

Sasaran program penguatan pengawasan yang akan dicapai adalah:

- Meningkatkan fungsi sistem pengendalian intern pemerintah di unit-unit kerja Kemenko PMK.
- Meningkatkan peran aparat pengawasan intern pemerintah (APIP) yang berfungsi untuk penjaminan kualitas (*quality assurance*) dan konsultasi.
- Opini WTP dari BPK

Adapun capaian program penguatan pengawasan antara lain:

1. Telah ditetapkan Permenko PMK Nomor 4 Tahun 2016 tentang Benturan Kepentingan;
2. Penyusunan laporan keuangan telah dilakukan sesuai ketentuan;
3. Evaluasi SPIP mendapat nilai 2,164;
4. Pemantauan pemanfaatan *output* belanja modal telah dilakukan;
5. Pemantauan penyerapan anggaran sudah dilakukan;
6. Strategi peningkatan opini BPK telah dilakukan;
7. Tindak lanjut rekomendasi BPK sudah dilakukan;
8. Wilayah Bebas Korupsi sudah disusun, menunggu penetapan dari pimpinan;
9. WBS sudah disusun, menunggu penetapan dari pimpinan;
10. Pengadaan barang dan jasa sudah dilakukan secara elektronik;
11. Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk Laporan Keuangan TA 2017;
12. Penghargaan dari Kemenkeu atas Penyajian Saldo Kas Bendahara Pengeluaran pada Laporan Keuangan K/L dan Laporan Pertanggungjawaban Bendahara Pengeluaran TA 2016 dengan Tingkat Akurasi Tinggi;
13. Survei internal PMPRB dengan nilai 81,01%.

#### **g. Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik**

Program ini bertujuan meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat (*stakeholder*). Kemenko PMK mewujudkan pelayanan publik melalui pelayanan perencanaan nasional yang melibatkan seluruh *stakeholder* (perguruan tinggi, pemerintah pusat dan daerah, organisasi profesi, dan organisasi kemasyarakatan lainnya) meningkatkan kualitas pelayanan publik sesuai dengan kebutuhan harapan masyarakat (*stakeholder*).

Sasaran program peningkatan kualitas pelayanan publik yang akan dicapai adalah:

- Meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada pemangku kepentingan;
- Meningkatkan jumlah unit pelayanan yang memperoleh standarisasi pelayanan;
- Meningkatkan indeks kepuasan pemangku kepentingan terhadap pelayanan.

Adapun capaian program peningkatan kualitas pelayanan publik antara lain:

1. Tersedia *Website* Kemenko PMK;
2. Tersedia *KontakPMK*;
3. Survei Pelaksanaan KSP kepada *stakeholder* secara online;
4. Pelaksanaan Survei eksternal terkait pelayanan publik;
5. KKN Tematik Revolusi Mental
6. Gugus Tugas Revolusi Mental
7. Pekan Kerja Nyata Revolusi Mental



Kemenko PMK Home Login

### Survei Evaluasi Hasil Pelaksanaan Koordinasi, Sinkronisasi, dan Pengendalian (KSP)

Keywords:

Showing 1-5 of 17 items.

#	Judul Rapat	Satuan Kerja	Tanggal Rapat	Jumlah Responden	Evaluasi
1	Pengembangan desa tangguh bencana	Asdep Tanggap Cepat Bencana	26 Mar 2018	0	<a href="#">Evaluasi</a>
2	Rapat koordinasi penyusunan sistem IKP	Asdep Tanggap Cepat Bencana	25 Mar 2018	0	<a href="#">Evaluasi</a>
3	Rapat Pembahasan Aplikasi Indeks Kualitas Pelayanan 3	Asdep Tanggap Cepat Bencana	9 Mar 2018	2	<a href="#">Evaluasi</a>
4	Rapat Pembahasan Aplikasi Indeks Kualitas Pelayanan 2	Asdep Tanggap Cepat Bencana	9 Mar 2018	5	<a href="#">Evaluasi</a>
5	Rapat Pembahasan Aplikasi Indeks Kualitas Pelayanan 1	Asdep Kompensasi Sosial	4 Mar 2018	1	<a href="#">Evaluasi</a>

« 1 2 3 4 »

© Kemenko PMK 2018

## Gambar Screenshoot Survei Pelaksanaan KSP Secara Online

The screenshot shows the website interface for the Ministry of Manpower and Cultural Affairs (Kemenko PMK). The main content area is titled 'INFORMASI PUBLIK' and features several report listings:

- SURVEI EKSTERNAL PMPRB KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN PEMBANGUNAN TAHUN 2016**: Includes an attachment 'SURVEI EKSTERNAL PMPRB.pdf' (897.94 KB).
- LAKIP KEMENKO PMK 2015**: Includes an attachment 'LAKIP KEMENKO.pdf' (12.71 MB).
- Renstra Kemenko PMK 2015-2019**: Includes an attachment 'Renstra Kemenko PMK 2015-2019.pdf' (1.51 MB).
- DIPA Kemenko PMK 2016**: Includes an attachment 'DIPA Kemenko PMK 2016.pdf'.

On the right side, there is a 'KONTAK KAMI' section with contact information:

- 01 Alamat: Jalan Medan Merdeka Barat No. 3 Jakarta Pusat
- 02 Telepon: (021) 345 9444
- 03 SMS CENTER: 0858 8000 1949
- 04 LAPORI: Layanan Aspirasi dan Pengaduan Online Rakyat

At the bottom right, there is a section for 'VIDEO KEGIATAN KEMENKO PMK'.

Gambar Screenshoot Hasil Survei Eksternal

#### **h. Program Akuntabilitas**

Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja merupakan area yang penting karena penerapan sistem akuntabilitas yang baik dapat mendorong birokrasi lebih berkinerja dan mampu mempertanggungjawabkan kinerjanya sesuai dengan segala sumber daya yang dipergunakannya.

Tujuan program ini adalah meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kemenko PMK.

Sasaran program akuntabilitas yang akan dicapai adalah:

- Meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja Kemenko PMK
- Dokumen penetapan kinerja, LAKIP dan IKU instansi disusun dan ditetapkan tepat waktu.
- Mengembangkan sistem manajemen kinerja organisasi, penggunaan indikator kinerja dan penguatan akuntabilitas kinerja melalui penyusunan LAKIP.
- Nilai akuntabilitas kinerja instansi minimal B.

Adapun capaian program akuntabilitas antara lain:

1. Nilai SAKIP Kemenko PMK tahun 2017 sebesar 70,18 (BB);
2. Permenko PMK Nomor 1 Tahun 2017 tentang IKU;
3. Permenko PMK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Renstra;
4. Penyusunan PK secara *cascading* dari Menteri sampai Eselon IV;
5. Monitoring dan evaluasi terhadap Renstra dan IKU secara bertahap;
6. Tersedia Pedoman Akuntabilitas Kinerja Kemenko PMK;
7. Penyusunan Laporan kinerja secara *cascading* (berjenjang dari Eselon IV sampai Menteri);
8. Sistem pelaporan kinerja telah berbasis elektronik melalui SIPK dan SIPP yang terhubung dengan sistem *e-Monev*, SMART dan TEPR.
9. Permenko IKU dan Renstra telah ditetapkan;
10. PK telah ditandatangani oleh Menteri, Pejabat Eselon I, II, III, dan IV;
11. Kualitas LAKIP, SAKIP, dan SPIP terus dilakukan dan diupayakan;
12. IKU akan dimonitoring dan dievaluasi secara bertahap;
13. Keterlibatan pimpinan dalam penyusunan sistem kinerja pegawai dan laporan kinerja.





INFORMASI PENILAIAN KINERJA Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan. Silakan LOGIN

**Selamat Datang**  
di Sistem Informasi Penilaian Kinerja KEMENKO PMK

**LOGIN**

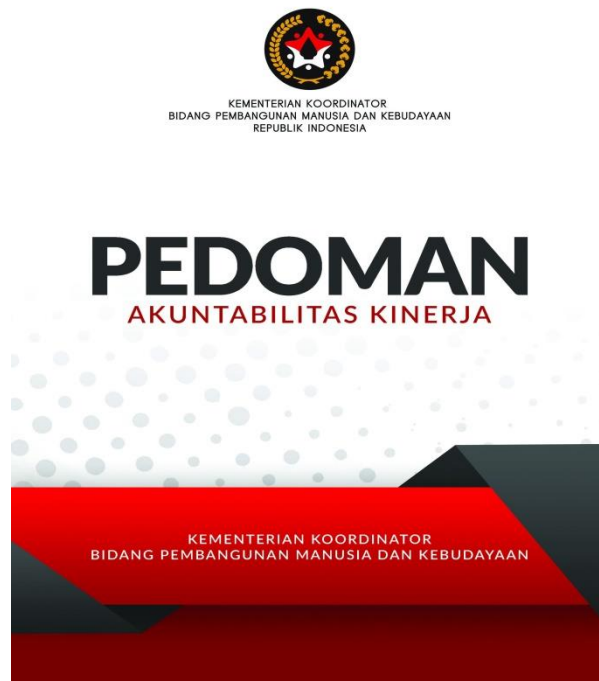
Username:

Password:

Login

Dukungan:  
Email: roinfodasi@kemenkopmk.go.id  
Telp: 021 3459444 ext 133, 134

Gambar. Tampilan Informasi Penilaian Kinerja pada Aplikasi SIPK (Sistem Informasi Penilaian Kinerja).



Gambar Tampilan Buku Pedoman Akuntabilitas Kinerja

14. Sistem pelaporan kinerja telah berbasis elektronik seperti *E Monev*, SMART, TEPRA, RAN HAM, RAN OGI, PPK, dan Aplikasi Evaluasi Pelaksanaan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

## i. Program Quick Wins

Pada tahun 2017, *Quick Wins* RB Kemenko PMK telah disepakati adalah Revolusi Mental. Revolusi Mental adalah perubahan secara cepat dalam cara pikir, cara kerja, cara hidup dan sikap serta perilaku bangsa Indonesia yang mengacu nilai-nilai strategis yaitu integritas, etos kerja dan gotong royong berdasarkan Pancasila yang berorientasi pada kemajuan, agar Indonesia menjadi negara yang maju, modern, makmur, sejahtera dan bermartabat.

Gerakan Nasional Revolusi Mental (GNRM) didasari atas kondisi mental atau karakter bangsa Indonesia yang tengah mengalami berbagai permasalahan sehingga untuk memperbaiki dan mengubahnya memerlukan gerakan bersama dengan melibatkan semua komponen bangsa secara bergotong-royong. Beberapa masalah mendasar bangsa antara lain: 1) Krisis integritas dan pandemik korupsi dalam penyelenggaraan negara dan praktik di Masyarakat; 2) Lemahnya etos kerja, kreativitas dan daya saing membuat Indonesia semakin tertinggal dibandingkan negara-negara lain. Pada saat yang sama persaingan global yang sengit dan memasuki Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA); 3) Krisis identitas ditandai dengan melemahnya budaya gotong royong, yang merupakan aset sosial-budaya Indonesia.

Program gerakan revolusi mental di lingkungan Kemenko PMK dilakukan dengan tujuan untuk melakukan perubahan ditingkat individu dan organisasi. Penajaman Rencana Aksi Revolusi Mental di Lingkungan Kemenko PMK juga dilaksanakan oleh Tim kerja lintas ke deputian menghasilkan rumusan definisi dan kriteria terkait menu pada *dashboard* kegiatan Kemenko PMK dan Pokok – pokok manajemen perubahan hasil rumusan tim kerja lintas ke deputian, yang kemudian disebut sebagai Nawa Revolusi Mental sebagai cek list target perubahan, yaitu :

- Log Book;
- Respon tugas maksimal 12 jam;
- Respon pengaduan maksimal 1 jam;
- Respon miscall maksimal 2 jam;
- Penyelesaian administrasi keuangan maksimal 1 minggu;
- Penyelesaian laporan pertanggungjawaban maksimal 1 bulan;
- Penyelesaian Rencana Kerja Tahunan (RKT);

- Penyelesaian Rencana Kerja Bulanan (RKB);
- Penyelesaian Laporan Kemajuan Kegiatan Bulanan (LKKB).

Sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan *Quick Wins* bahwa pengertian *Quick Wins* adalah:

- 1) Suatu inisiatif yang mudah dan cepat dicapai yg mengawali suatu program besar dan sulit.
- 2) Momentum awal yang positif dan juga kepercayaan diri untuk selanjutnya melaksanakan RB secara konsisten dan berkelanjutan
- 3) *Output*-nya perbaikan sistem dan mekanisme kerja atau produk utama K/L dan Pemda yang sesuai dengan peran, tupoksi dan karakteristik masing-masing

Berdasarkan pengertian tersebut, maka Revolusi Mental yang telah disepakati sebagai *Quick Wins* Kemenko PMK di reviu kembali. Mencermati pengertian-pengertian *Quick Wins* dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 13 Tahun 2011 tentang *Quick Wins* maka perlu perumusan kembali *Quick Wins* yang sesuai dengan kondisi Kemenko PMK. Pelaksanaan Reviu *Quick Wins* RB Kemenko PMK diawali dengan identifikasi program unggulan masing-masing kedeputian dan Sekretariat Kemenko PMK dengan berdasarkan prinsip-prinsip dan kreiteria *Quick Wins*.

Prinsip-prinsip dalam *Quick Wins* ada 7 yaitu pengungkit, mudah dan cepat, berdampak, memotivasi, memperbaiki, meyakinkan dan nyata, independen.

Dalam merumuskan *Quick Wins* harus memenuhi kriteria yaitu:

- 4) Berasal dari program-program reformasi birokrasi, yang terdapat di dalam Road Map Reformasi Birokrasi.
- 5) Merupakan bagian utama (core business) dari peran, tugas, fungsi, dan karakteristik Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah yang bersangkutan.
- 6) Memberikan dampak perbaikan yang besar dan dapat dirasakan oleh para pemangku kepentingan eksternal dan internal Kementerian/Lembaga dan Pemerintah Daerah.
- 7) Merupakan sebuah aktivitas nyata dan dirasakan manfaatnya secara cepat oleh pemangku kepentingan utama eksternal dan internal Kementerian/Lembaga.

Dari hasil identifikasi telah ditetapkan usulan *Quick Wins* adalah sebagai berikut:

UNIT KERJA	PROGRAM/KEGIATAN
Deputi II	Percepatan Penyaluran Bantuan Pangan Non Tunai
Deputi III	Pencegahan dan Penurunan <i>Stunting</i>
Deputi IV	Peningkatan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi,
Deputi V	Pencapaian 3 Sukses ASIAN Games
Deputi VII	Penyaluran dan Pemanfaatan Dana Desa: Program Padat Karya Tunai Desa
Setkemenko	Percepatan Reorganisasi,

Hasil identifikasi diusulkan pada rapat pimpinan untuk mendapatkan arahan.



Gambar Benner Gerakan Revolusi Mental Kemenko PMK



**RANGKUMAN CAPAIAN**

NO.	NAMA	PROTO	KATALOG DATA	KATALOG KEBELAJAAN	LAPORAN PERTANGGUNGJAWABAN	LAPORAN KEJANGKARAN	BENCANA KERJA BULANAN	LAPORAN KERJA BULANAN	BURU HARBAN
1	<b>Herbin Manihuruk</b> Asisten Deputi Pengurangan Risiko Bencana		31 2016-06-16	1 2016-04-08	2/5 2016-05-05	4/4 2016-05-05	24 2016-06-03	17 2016-06-01	124 2016-06-03
2	<b>Djoko Joewono</b> Asisten Deputi Tanggap Cepat Bencana		23 2016-08-29	1 2016-03-22	1/3 2016-05-05	3/3 2016-05-10	15 2016-05-10	12 2016-05-10	102 2016-06-03
3	<b>Detty Rosita</b> Asisten Deputi Penanganan Pasca Bencana		21 2016-08-14	1 2016-06-20	2/3 2016-05-05	3/3 2016-05-05	4 2016-03-22	3 2016-04-29	114 2016-06-23
4	<b>Ponco Respati Nugroho</b> Asisten Deputi Konflik Sosial		20 2016-03-30	0 0000-00-00	1/2 2016-04-08	2/2 2016-04-07	26 2016-06-24	20 2016-06-24	114 2016-06-28
5	<b>G. Fajar Suryono</b> Asisten Deputi Kompensasi Sosial		84 2016-06-02	11 2016-04-05	5/7 2016-04-15	0/0 0000-00-00	21 2016-05-04	14 2016-04-11	160 2016-06-02

**Gambar Screenshot Rangkuman Capaian Eselon II**



**Gambar Kegiatan Reviu Quick Wins**

**2.2. Permasalahan dan Tindak Lanjut**

Permasalahan pelaksanaan reformasi birokrasi di bawah ini disadari oleh Kemenko PMK dan oleh karenanya perlu diupayakan perbaikan kedepan yang harus segera ditindaklanjuti seperti beberapa hal :

- 1) Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Kemenko PMK belum sepenuhnya berjalan optimal dikarenakan perubahan *mind set* dan budaya/kultur aparatur belum menyeluruh. Reformasi Birokrasi pada hakekatnya adalah sebuah komitmen dan perubahan sikap serta mental menuju tata kelola pemerintahan yang baik;
- 2) Belum optimalnya dukungan dan koordinasi unit kerja dalam bentuk penciptaan dokumen pendukung RB di Lingkungan Kemenko PMK;
- 3) Kemenko PMK belum memiliki *Whistleblowing System*. *Whistleblowing System* adalah suatu sistem yang disediakan oleh Instansi bagi pengguna layanan/masyarakat yang memiliki informasi dan ingin melaporkan suatu perbuatan berindikasi pelanggaran yang terjadi di lingkungan Kemenko PMK;

### **Tindak Lanjut**

Tindak lanjut yang akan dilaksanakan dalam menghadapi permasalahan di antaranya adalah:

1. Perlu melakukan komunikasi dan sosialisasi yang lebih intensif dengan melibatkan seluruh pejabat/pegawai di berbagai tingkatan secara aktif dalam diskusi pelaksanaan RB, seperti mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam seminar/diklat/ workshop terkait RB; dan mendorong seluruh jajaran pimpinan untuk menjadi role model atau agen perubahan. Meningkatkan peran dan tanggung jawab Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan sesuai tugas dan tanggung jawab masing-masing;
2. Perlu melibatkan perwakilan unit kerja dalam Tim Reformasi Birokrasi;
3. Mengupayakan percepatan penetapan kebijakan internal seperti Wistle Blowing System di Lingkungan Kemenko PMK.

## **BAB III**

### **PENILAIAN PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI DAN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH**

#### **3.1. Penilaian Pelaksanaan Reformasi Birokrasi dan AKIP**

Sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi Tahun 2010-2025 dan Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 11 Tahun 2015 tentang Road Map Reformasi Birokrasi Tahun 2015-2019 maka Kementerian PAN dan RB melakukan evaluasi atas pelaksanaan Reformasi Birokrasi pada Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

Pelaksanaan evaluasi Reformasi Birokrasi berpedoman pada Peraturan Menteri PAN dan RB Nomor 14 Tahun 2014 tentang Pedoman Evaluasi Reformasi Birokrasi Instansi Pemerintah. Evaluasi difokuskan pada upaya-upaya yang dilakukan oleh Kemenko PMK dalam pelaksanaan reformasi birokrasi.

Tujuan evaluasi adalah:

- a. untuk menilai kemajuan pelaksanaan program reformasi birokrasi dalam rangka mencapai sasaran yaitu mewujudkan birokrasi yang bersih dan akuntabel, birokrasi yang efektif dan efisien, serta birokrasi yang mampu memberikan pelayanan publik yang semakin membaik.
- b. untuk memberikan saran perbaikan dalam rangka meningkatkan kualitas reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK.

Dalam rangka menilai perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kemenko PMK tahun 2017 maka akan dilakukan evaluasi oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB melalui surat tugas Nomor:319/AA.04/2017 dan Nomor:320/RB.04/2017, tanggal 8 September 2017. Beberapa kegiatan yang dilaksanakan dalam evaluasi adalah sebagai berikut:



### ***Entry Meeting:***

Tahapan evaluasi pelaksanaan RB dan AKIP Kemenko PMK diawali dengan pertemuan awal Tim Reformasi Birokrasi Kemenko PMK dengan Tim Evaluator Kementerian PANRB dilaksanakan pada tanggal 14 September 2017. Evaluasi pelaksanaan Reformasi Birokrasi akan berlangsung selama kurang lebih 1 bulan. Pertemuan awal ini dipimpin oleh Sekretaris Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Y.B. Satya Sananugraha, selaku Ketua Tim RB Kemenko PMK.



**Gambatr Kegiatan *Entry Meeting* Tim Evaluator RB dan AKIP**

Sebagai tindaklanjut dari *entry meeting* Tim Evaluator RB dan AKIP telah diadakan Kegiatan persiapan evaluasi reformasi birokrasi dan AKIP Kemenko PMK dengan tujuan untuk mendapat perkembangan terkait data dukung RB dan AKIP serta persiapan survei internal kapasitas organisasi yang akan dilakukan oleh tim evaluasi Kementerian PANRB



**Gambar Rapat Persiapan Evaluasi RB dan AKIP di Ruang Rapat Lantai 2 Kemenko PMK yang Dipimpin oleh Ketua Tim RB**

### **Pendalaman:**

Untuk melakukan penilaian pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Kemenko PMK, Tim Evaluator Kementerian PANRB telah melakukan pendalaman pelaksanaan RB di Kemenko PMK, yang dibagi dalam kelompok-kelompok sesuai dengan delapan area perubahan dan *quick wins*, pada tanggal 6 Oktober 2017 bertempat di Gedung Heritage Kemenko PMK.

Mengawali pelaksanaan pendalaman RB, bertempat di ruang rapat lantai 7 Kemenko PMK, Tim Evaluator dari Kementerian PANRB melakukan survei internal kapasitas organisasi terhadap pegawai di Kemenko PMK yang terdiri dari eselon II, III, IV, dan Staf lainnya di lingkup Kemenko PMK yang berjumlah sekitar seratus orang.

Tujuan diadakannya survei kapasitas organisasi adalah untuk mengetahui persepsi pelaksanaan tugas dan fungsi pegawai, beserta kinerja yang harus dihasilkan. Selain hal itu juga bertujuan untuk melihat pengelolaan organisasi yang terdiri dari penilaian terhadap atasan, pengelolaan layanan kepegawaian, dan rekrutmen pegawai, pengelolaan barang dan jasa termasuk didalamnya untuk mengetahui adanya praktek korupsi, kolusi dan nepotisme (KKN) dalam proses pengelolaan organisasi.



**Gambar Kegiatan Survei Kapasitas Organisasi dan Pendalaman RB**

***Exit Meeting:***

Kementerian PANRB telah melakukan evaluasi pelaksanaan RB Kemenko PMK pada tahun 2017. Hasil evaluasi sementara yang dilakukan oleh Kementerian PANRB disampaikan pada acara *exit meeting* Tim Evaluator Kementerian PANRB.



**Gambar Kegiatan *Exit Meeting* Tim Evaluator Kementerian PANRB**

Hasil evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK tahun 2017 oleh Kementerian PANRB menunjukkan indeks RB Kemenko PMK dengan nilai komponen pengungkit dan komponen hasil adalah 70,35, dengan kategori “B” dengan perincian sebagai berikut:

**INDEKS REFORMASI BIROKRASI  
KEMENTERIAN KOORDINATOR BIDANG PEMBANGUNAN MANUSIA DAN  
KEBUDAYAAN  
TAHUN 2016 DAN 2017**

NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
			2016	2017
<b>I.</b>	<b>Komponen Pengungkit</b>			
1.	Manajemen Perubahan	5,00	3,72	3,52
2.	Penataan Peraturan Perundang-Undangan	5,00	2,71	2,71
3.	Penataan dan Penguatan Organisasi	6,00	3,84	2,82
4.	Penataan Tatalaksana	5,00	2,26	2,13
5.	Penataan Sistem Manajemen SDM	15,00	12,63	13,03
6.	Penguatan Akuntabilitas	6,00	2,91	4,08
7.	Penguatan Pengawasan	12,00	4,33	6,21
8.	Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	6,00	3,44	3,66
<b>Total Komponen Pengungkit (A)</b>		<b>60,00</b>	<b>35,83</b>	<b>38,16</b>
NO.	KOMPONEN PENILAIAN	BOBOT	NILAI	
			2016	2017
<b>II.</b>	<b>Komponen Hasil</b>			
1.	Nilai Akuntabilitas Kinerja	14,00	9,82	9,88
2.	Survei Internal Organisasi	6,00	4,18	4,86
3.	Survei Eksternal Persepsi Korupsi	7,00	3,73	6,25
4.	Opini BPK	3,00	3,00	3,00
5.	Survei Eksternal Pelayanan Publik	10,00	7,12	8,20
<b>Total Komponen Hasil (B)</b>		<b>40,00</b>	<b>27,84</b>	<b>32,19</b>
<b>INDEKS REFORMASI BIROKRASI (A+B)</b>		<b>100,00</b>	<b>60,47</b>	<b>70,35 (B)</b>



Sesuai dengan hasil penilaian di atas, ada beberapa rekomendasi dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK, yaitu :

1. Menugaskan para AoC dengan target-target perubahan nyata di seluruh unit kerja, serta melakukan monitoring dan evaluasi berkala atas capaian dan hambatan dalam meningkatkan budaya kerja dan perubahan *mindset* di Kemenko PMK;
2. Meningkatkan pemahaman *assessor* PMPRB terkait kondisi ideal yang diharapkan dari pelaksanaan reformasi birokrasi pada masing-masing area perubahan sehingga dapat mengurangi gap penilaian antara *assessor* PMPRB dengan Tim RBN;
3. Melakukan evaluasi terhadap pengendalian penyusunan peraturan perundang-undangan secara berkala serta menindaklanjuti hasil evaluasi untuk memberikan masukan terhadap perbaikan system penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Menyusun Peta Proses Bisnis dan melakukan evaluasi SOP untuk melihat tingkat efisiensi dan efektivitas terhadap pencapaian kinerja Kemenko PMK;
5. Melakukan optimalisasi implementasi e-government agar sepenuhnya terintegrasi dan komprehensif;
6. Melakukan *assessment* pada seluruh pegawai Kemenko PMK, sehingga pengembangan kompetensi pegawai didasarkan pada gap kompetensi;
7. Melakukan optimalisasi Sistem Informasi Kepegawaian agar dapat diakses oleh pegawai Kemenko PMK;
8. Melakukan evaluasi atas efektivitas penanganan gratifikasi, penerapan SPIP, pengaduan masyarakat, *Whistle-Blowing-System*, dan benturan kepentingan;
9. Meningkatkan kualitas pembangunan Zona Integritas (ZI) dengan menyinergikan peran Tim Penilai Internal dan Tim Zona Integritas di tingkat unit kerja dalam mengawal pelaksanaan RB di tingkat unit kerja secara komprehensif sehingga dapat terwujud unit kerja Menuju WBK/WBBM di lingkungan Kemenko PMK.



### **3.2. Penyesuaian Tunjangan Kinerja**

Nilai Reformasi Birokrasi Kemenko PMK tahun 2017 adalah 70,35 atau predikat BB. Nilai RB Kemenko PMK tahun 2017 mengalami kenaikan sebesar 2,63 dari nilai 67,72 pada tahun 2016. Namun demikian, kenaikan tersebut belum memenuhi target yang diharapkan yaitu 75,01, sehingga pencapaian nilai tersebut belum dapat dijadikan dasar untuk mengajukan perubahan tunjangan kinerja

Berdasarkan capaian nilai reformasi birokrasi Kemenko PMK, maka pada tahun 2017, Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan belum dapat mengusulkan kenaikan tunjangan kinerja bagi pegawai Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan.

## BAB IV PENUTUP

Pelaksanaan reformasi birokrasi di lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada tahun 2017 merupakan penyempurnaan dan penguatan dari pelaksanaan reformasi birokrasi sebelumnya.

Secara keseluruhan, penyelenggaraan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan pada Tahun 2017 ternilai baik. Hal tersebut terlihat dari capaian-capaian yang dihasilkan dan adanya semangat pegawai Kemenko PMK yang terus melaksanakan reformasi birokrasi di tahun mendatang. Salah satunya adalah dengan terus menerus memperbaiki kualitas pelayanan publik.

Melalui optimalisasi 8 (delapan) area perubahan program reformasi birokrasi dan *Quick Wins* diharapkan pelaksanaan reformasi birokrasi Kemenko PMK semakin mendapat kemajuan seiring perbaikan di berbagai lini area perubahan.

Untuk itu dalam rangka meningkatkan kualitas pelaksanaan program dan kegiatan di setiap area perubahan, Kemenko PMK perlu menindaklanjuti saran perbaikan baik yang terdapat dalam hasil survei internal, maupun saran yang disampaikan oleh Tim Evaluator Kementerian PANRB. Selain itu, seluruh jajaran pimpinan dan pegawai di lingkungan Kemenko PMK perlu memiliki komitmen yang sama dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi.